

STRATEGI PEMERINTAH DKI JAKARTA DALAM PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA PASAR TANAH ABANG DI JAKARTA PUSAT

Fauziah¹⁾, Putu Nomy Yasintha²⁾, I Ketut Winaya³⁾

^{1,2,3)} Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email : zfauziah199@gmail.com¹⁾, putu_nomy@unud.ac.id²⁾, ketutwinaya14@yahoo.com³⁾

ABSTRACT

The existence of streetvendors in Tanah Abang area is considered a cause of congestion, disturbing pedestrians, and creating chaos. To overcome this problem, the DKI Jakarta Government made one strategy or policy to organize Tanah Abang area, namely the construction of the Tanah Abang Multipurpose Crossing Bridge (JPM). Data obtained from observation, interviews, and documentation. The theory used is the theory of strategic management from Wheelen and Hunger with 4 indicators, namely environmental observation, strategy formulation, strategy implementation, evaluation and control. As well as using SWOT analysis techniques. Tanah Abang Multipurpose Crossing Bridge has not been fully maximized in overcoming the arrangement and empowerment of street vendors, low human resources, lack of awareness of traders and the public.

Keywords : Structuring and empowering street vendors, Strategic Management, SWOT Analysis

1. PENDAHULUAN

Pedagang kaki lima dalam berjualan selalu memilih tempat yang ramai dan banyak dikunjungi pembeli. Lokasi yang disukai Pedagang kaki lima yaitu sekitar Pasar Tanah Abang. Selain pelaku usaha PKL juga sebagai konsumen, yang dimaksud dengan PKL sebagai konsumen adalah mereka merupakan subjek yang menjadi sasaran dari kebijakan-kebijakan pemerintah.

Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10 Tahun 2015 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima. Peraturan Gubernur ini memiliki tujuan untuk menciptakan sebuah ketertiban, kenyamanan, dan keindahan kota, memberikan kesempatan berusaha bagi masyarakat, dan mengendalikan

perkembangan usaha pedagang di lokasi yang tidak diperuntukkan untuk berjualan.

Pasar Tanah Abang sebagai pusat perdagangan yang besar dengan jumlah pedagang kaki lima (PKL) pada tahun 2018 berjumlah 595 pedagang, tahun 2019 dengan jumlah 149 pedagang dan pada tahun 2020 dengan jumlah 70 pedagang. Banyaknya jumlah pedagang menyebabkan wilayah sekitar Pasar Tanah Abang selalu mengalami kemacetan. Kemacetan yang terjadi disekitar wilayah Tanah Abang ini disebabkan oleh banyaknya pedagang yang berjualan di trotoar, serta banyaknya angkutan umum yang berhenti sembarangan. Keberadaan pedagang kaki lima di jalur pedestrian dianggap mengganggu pejalan kaki dan membuat semrawut serta juga berpengaruh pada omset penjualan para pedagang yang

sudah memiliki kios di Pasar Tanah Abang tersebut.

Dalam menata kawasan Tanah Abang bukan sebuah pekerjaan yang mudah bagi Pemerintah DKI Jakarta. Mereka mengalami masalah sepanjang tahun 2018 hingga akhirnya dapat membangun Jembatan Penyeberangan Multiguna Tanah Abang.

Jembatan Penyeberangan Multiguna ini guna merelokasi pedagang yang berjualan di trotoar agar mengurangi kemacetan yang sering terjadi di area tersebut dikarenakan banyaknya para pejalan kaki yang memenuhi Jalan Jatibaru Raya untuk berbelanja. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mendata terdapat 595 pedagang kaki lima yang berjualan di Pasar Tanah Abang, namun kios di JPM Tanah Abang ini hanya tersedia berjumlah 446 kios. Berdasarkan uraian tersebut, Penulis mengangkat penelitian yang berjudul "**Strategi Pemerintah DKI Jakarta dalam Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Pasar Tanah Abang di Jakarta Pusat**".

2. KAJIAN PUSTAKA

Manajemen Strategi

Wheelen (2003) menyebutkan manajemen strategis ialah keputusan dan tindakan manajerial pada penyusunan strategi yang efektif untuk mencapai sebuah tujuan dengan analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threats). Penelitian ini akan menggunakan empat indikator yaitu pengamatan lingkungan, perumusan strategi, implementasi strategi, evaluasi dan

pengendalian serta menggunakan Analisis SWOT.

Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)

Izin usaha mikro dan kecil (IUMK) merupakan sebuah tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk izin usaha mikro dan kecil dalam bentuk satu lembar. Tujuan dari IUMK ini adalah untuk memberikan legalitas resmi bagi pelaku usaha mikro dan kecil, serta memberikan kemudahan dalam mengakses sumber pembiayaan dan pengembangan usaha dari Pemerintah.

3. METODELOGI PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Unit analisis yaitu organisasi dan masyarakat. Informan menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif interpretatif, yang dilaksanakan dengan beberapa tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teknik penyajian data dengan teks yang bersifat naratif yang disajikan dalam bentuk uraian singkat atau mendeskripsikan permasalahan yang sedang diteliti.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Visi dan Misi Kecamatan Tanah Abang

Adapun visi dan misi dari kecamatan Tanah Abang yaitu :

Visi : "Mewujudkan Kecamatan Tanah Abang sebagai kawasan perdagangan, wisata sejarah dan hiburan yang aman, rukun, dan sejahtera".

Misi :

1. Meningkatkan pelayanan masyarakat
2. Penegakan supremasi hukum
3. Meningkatkan kualitas kehidupan dan kerukunan warga
4. Peningkatan pemberdayaan masyarakat
5. Meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan

Hasil Temuan

Pengamatan Lingkungan

Dilihat dari pengamatan lingkungan internal dalam memberikan strategi dapat diketahui kekuatan yang dimiliki yaitu terdapatnya Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10 Tahun 2015 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima yang menjadi acuan atau pedoman dalam menangani permasalahan PKL.

Terdapat kekuatan yang lain yaitu dengan memberikan fasilitas yang dibutuhkan seperti tempat berjualan, sarana, prasarana, orang-orang yang mengaturnya atau mengendalikannya. Ada juga yang menjadi kekuatan dari Jembatan Penyeberangan Multifungsi (JPM) Tanah Abang sebagai salah satu strategi yaitu memberikan fasilitas berupa kios, mushola, *smart* toilet, CCTV, dan *charging boot*, adanya keamanan gedung yang terjamin, serta kebersihan dan ketertiban yang memadai. Sementara itu, terdapat kelemahan yang dimiliki yaitu tidak sinkronnya pemerintah dalam hukum, kurangnya koordinasi instansi yang satu dengan yang lainnya, instansi yang satu dengan yang lain kurang sinergi, organisasi masyarakat kurang membantu dan masih kurangnya kesadaran pedagang kaki lima maupun masyarakat

Dilihat dari pengamatan lingkungan eksternal dalam memberikan strategi dapat diketahui peluang yang dimiliki yaitu dimana peluangnya terletak dari Pasar Tanah Abangnya yang merupakan sebagai pusat atau sentra niaga. Dimana peluang kedepannya kearah yang lebih besar lagi. Dengan adanya JPM ini mampu mengatasi kemacetan dan kesemrawutan yang disebabkan oleh PKL yang berjualan di trotoar. Dengan begitu seluruh sektor dapat berjalan dengan selaras diantaranya sektor perekonomian dan sektor transportasi. Sedangkan ancaman yang dimiliki dalam memberikan strategi yaitu akan ada orang-orang yang ingin menguasai kawasan Tanah Abang Tersebut.

Perumusan Strategi

Keterkaitan antara indikator ini dengan hasil temuan yaitu dimana dengan berdirinya Pasar Jaya ini telah memformulasikan misi, visi, tujuan, strategi, dan pedoman dalam memberikan strategi Adapun misi yang dijalankan yaitu menyediakan pasar modern dan tradisional yang bersih, aman, nyaman dan berwawasan lingkungan serta memenuhi kebutuhan barang dan jasa yang lengkap, segar, murah dan bersaing. Visi yang dijalankan yaitu menjadikan pasar tradisional dan modern sebagai sarana unggulan dalam penggerak perekonomian daerah Provinsi DKI Jakarta.

Berjalannya visi dan misi ada sebuah tujuan yang ingin dicapai yaitu tidak adanya lagi PKL yang berdagang di trotoar, meningkatkan taraf hidup serta kesejahteraan para pedagang, membasmi

kemacetan juga kesemrawutan di sekitar Pasar Tanah Abang.

Strategi yang dilakukan yaitu meningkatkan kemampuan berwirausaha dengan memberikan bimbingan, pelatihan, dan bantuan permodalan, memberikan fasilitas yang memadai, melaksanakan sosialisasi kepada pedagang dan masyarakat serta memberikan pendampingan dalam mendapatkan pinjaman permodalan.

Adapun pedoman yang menjadi acuan dalam pelaksanaan strategi tersebut yaitu Peraturan Gubernur Daerah Provinsi Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10 Tahun 2015 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima.

Implementasi Strategi

Jika dilihat dari pengembangan program itu berupa Program Pelatihan JakPreneur (Jakarta Entrepreneur). Jakarta Entrepreneur ini dimaksudkan untuk membantu para pedagang kaki lima yang ingin berubah menjadi UMKM.

Biaya atau anggaran dalam pelaksanaan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan Sumber Pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat. Prosedur kerja yang digunakan setiap karyawan yaitu dengan SOP (Standar Operasional Prosedur).

Pedagang kaki lima untuk bisa menempati JPM tersebut harus melalui tahapan-tahapan yang telah ditentukan oleh Pemerintah yaitu pendataan PKL, pendaftaran PKL, penetapan lokasi PKL,

pemindahan lokasi dan penghapusan lokasi PKL, serta peremajaan lokasi PKL.

Evaluasi dan Pengendalian

Terkait dengan evaluasi dan pengendalian yang dilakukan oleh tim koordinasi penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima dilakukan dengan 3 cara yaitu memonitoring, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan PKL. Standar kinerja yang telah diterapkan ini sudah sesuai SOP yang telah ditentukan. Hasil kerjanya juga sangat memuaskan. Dimana para pedagang kaki lima sudah memiliki tempat untuk berjualan, sudah memiliki izin untuk usaha, mendapatkan penghasilan yang maksimal.

Standar kinerja yang digunakan itu sesuai dengan SOP yang sudah diberlakukan seperti pendaftaran, pelatihan, pendampingan, proses perizinan. Kinerja yang telah dicapai yaitu para PKL sudah memiliki izin usaha.

Identifikasi Lingkungan Eksternal dan Lingkungan Internal

Peluang

1. Tanah Abang sebagai sentra primer

Sentra Primer Tanah Abang memiliki arti penting bagi peningkatan kualitas lingkungan kota dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan khususnya bagi pengembangan ekonomi kota dalam rangka menunjang Jakarta sebagai Kota Jasa berskala nasional dan internasional. Pasar Tanah Abang bukan hanya sebagai pusat perbelanjaan, tetapi kawasan tersebut akan dibangun menjadi usaha terpadu berupa perhotelan, pertokoan, kios, gedung parkir, food court, dan restoran serta pergudangan.

2. Memberikan kesempatan usaha kepada masyarakat

Pasar Tanah Abang sebagai pusat perdagangan pakaian dan tekstil menjadi kesempatan bagi para masyarakat untuk membuka usaha atau berjualan di kawasan Pasar Tanah tersebut.

3. Menjadi platform kerjasama

Pasar Tanah Abang sebagai pusat perdagangan juga membuka kesempatan para Pedagang Kaki Lima melakukan platform kerjasama atau berkolaborasi dengan pihak-pihak yang lain. Kerjasama ini memberikan kesempatan kepada pedagang untuk dapat memasarkan produknya secara lebih luas bukan hanya kepada pelanggan yang datang secara langsung ke tokonya.

4. Meningkatkan pendapatan PKL

Pembangunan Jembatan Penyeberangan Multiguna (JPM) Tanah Abang untuk memindahkan PKL yang awalnya berjualan di trotoar lalu dipindahkan ke JPM ini. Dengan adanya JPM ini membantu para PKL untuk meningkatkan pendapatan mereka. Pedagang Kaki Lima juga tidak harus main kucing-kucingan dengan para Satpol PP yang bertugas.

5. Mengurangi kemacetan dan kesemrawutan

Untuk mengurangi kemacetan dan kesemrawutan Pemerintah DKI Jakarta membangun sebuah Jembatan Penyeberangan Multiguna. Akibat dari PKL yang mengokupasi kawasan Tanah Abang.

Ancaman

1. Adanya pihak-pihak lain yang ingin menguasai Pasar Tanah Abang

Kawasan Tanah Abang sebagai kawasan strategis yang memiliki peluang besar bagi sektor perekonomian. Hal tersebut menjadi pemicu akan adanya pihak-pihak lain yang ingin menguasai pasar Tanah Abang atau merebut pangsa pasar dari kawasan Tanah Abang tersebut.

2. Masih kurangnya tempat atau lokasi usaha untuk para PKL

Jembatan Penyeberangan Multiguna (JPM) Tanah Abang hanya menampung 446 PKL, sedangkan jumlah PKL yang ada melebihi jumlah kios yang tersedia di JPM tersebut.

3. Masih adanya pedagang yang berjualan di pinggir jalan

Pedagang yang tidak mendapatkan kios di JPM, mereka kembali lagi berjualan di trotoar. Karena para PKL belum mendapatkan tempat untuk berjualan sehingga mereka memilih untuk berjualandi trotoar lagi.

4. Terganggunya masyarakat dengan keberadaan PKL

Dimana yang seharusnya fungsi trotoar untuk para pejalan kaki malah digunakan oleh PKL untuk berjualan. Sehingga masyarakat terganggu dengan keberadaan mereka.

5. Banyaknya kios-kios yang tutup karena pandemi

Adanya pandemi ini menyebabkan banyak kios-kios yang tutup karena sepi pembelinya dan membuat sebagian besar kios-kios menjadi tutup.

Kekuatan

1. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan PKL

Pembangunan Jembatan Penyeberangan Multiguna (JPM) atau Skybridge menjadi salah satu strategi pemerintah. Dengan dibangunnya JPM tersebut mampu mengatasi permasalahan PKL tersebut. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan PKL dilakukan untuk mengetahui atau menilai sejauh mana JPM dapat mengatasi permasalahan penataan dan pemberdayaan PKL Pasar Tanah Abang.

2. Memiliki fasilitas yang memadai

Jembatan Penyeberangan Multiguna (JPM) atau Skybridge memiliki fasilitas yang memadai berupa kios yang berukuran 2mx1m, Smart toilet, CCTV, mushola, charging boot.

3. Pedagang dapat melaksanakan kegiatan berjualan dengan aman

Dengan dibangunnya Jembatan Penyeberangan Multiguna (JPM) Tanah Abang membuat para Pedagang Kaki Lima (PKL) dapat melakukan kegiatan berjualan menjadi lebih tertib dan aman tidak harus merasa takut akan di gusur oleh Satpol PP. Jembatan Penyeberangan Multiguna (JPM) Tanah Abang memiliki beberapa petugas keamanan yang bertugas menjaga keamanan di JPM tersebut.

4. Adanya peningkatan pendapatan PKL

Para Pedagang Kaki Lima (PKL) sangat senang dengan dibangunnya JPM ini karena dapat meningkatkan pendapatan berjualan mereka.

Kelemahan

1. Tidak sinkronnya pemerintah dalam penegakan aturan

Tidak sinkronnya pemerintah dalam penegakan hukum, artinya masih tidak terpadu atau kurangnya keselarasan antara instansi satu dengan instansi lainnya.

2. Organisasi masyarakat kurang membantu

Tidak hanya Pemerintah yang harus menanganinya, harus melibatkan banyak orang. Kebijakan tidak bisa terlaksana dengan baik karena masih adanya organisasi yang tidak mau membantu.

3. Adanya pedagang yang berjualan di pinggir jalan

JPM Tanah Abang hanya memiliki 446 kios yang berarti hanya 446 PKL yang dapat menempati kios tersebut. Sedangkan PKL di Pasar Tanah tersebut jumlahnya melebihi jumlah kios JPM. Sehingga menyebabkan para PKL yang tidak mendapatkan kios di JPM memilih untuk berjualan di trotoar.

4. Kurangnya kesadaran pedagang kaki lima dan masyarakat

Sudah adanya peraturan akan tetapi PKL masih membandel dengan berjualan di trotoar atau tempat yang dilarang. Masyarakatnya juga kurang berpartisipasi untuk membantu pemerintah dalam penataan dan pemberdayaan yang dilakukan untuk pedagang kaki lima.

5. Pedagang belum memiliki modal

Pedagang belum memiliki modal berjualan juga menyewa kios. Pemerintah masih kurang dalam memberikan pembinaan ataupun pinjaman kepada para PKL

Identifikasi Isu Strategis

Isu strategis ini dikelola melalui perumusan alternatif strategi sebagai upaya

pemecahan isu. Adapun isu strategis tersebut sebagai berikut :

1. Pedagang masih berjualan di trotoar

Sudah dibangunnya JPM Tanah Abang kenyataannya masih banyaknya PKL yang berjualan di trotoar. Hal tersebut terjadi karena di JPM hanya terdapat 446 kios yang tersedia sedangkan jumlah PKL yang ada melebihi jumlah kios tersebut. Sehingga menyebabkan PKL yang tidak mendapatkan kios di JPM kembali

5. KESIMPULAN

Terdapat salah satu strategi yang digunakan Pemerintah DKI Jakarta untuk menangani penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima Pasar Tanah Abang yaitu dengan dibangunnya Jembatan Penyeberangan Multifungsi Tanah Abang. Dengan adanya pembangunan JPM Tanah Abang mampu meningkatkan pendapatan para pedagang.

Hasil analisis terhadap faktor-faktor kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari JPM Tanah Abang sebagai salah satu strategi menghasilkan dua prioritas strategis alternatif yang digunakan

Dewi, G. A. K., Yasintha, P. N., & Purnamaningsih, P. E. Implementasi Kebijakan Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) di Kecamatan Denpasar Barat.

berjualan di trotoar. Setiap harinya banyak PKL yang datang ke Pasar Tanah Abang dari mana saja yang menyebabkan jumlah PKL bertambah dan lokasi atau tempat usaha para PKL belum tersedia lagi.

2. Tidak semua PKL terdata

Setiap harinya jumlah PKL terus bertambah dan tidak memiliki tempat untuk berjualan. Ketika ingin mendaftar izin usaha itu harus pedagang asli DKI Jakarta.

yaitu mengembangkan Pasar Tanah Abang sebagai Sentra Primer Tanah Abang dan meningkatkan platform kerjasama atau kolaborasi dengan pihak-pihak yang lain.

6. DAFTAR PUSTAKA

Wheelen, Thomas L. & Hunger, J. David. *Strategic Management and Business Policy*, New York: Pearson, 2012.

Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10 Tahun 2015 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima.